

## BAB III

### TAKTIK GERAKAN #METOO AS DALAM MENCAPAI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERHADAP HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT

#### 3.1. Taktik Gerakan #MeToo AS Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori *Transnational Advocacy Network*

Dalam memperjuangkan tuntutan perubahan hukum pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari Gerakan #MeToo AS, mereka melakukan berbagai upaya melalui aktivisme transnasionalnya. Gerakan #MeToo AS dan mobilisasi serupa gerakan ini di seluruh dunia telah menunjukkan eksistensi mereka sebagai aktor yang berpengaruh dalam politik internasional. Jaringan advokasi transnasional yang terbentuk melalui pertukaran informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap meluasnya kesadaran global akan masalah ini. Tujuan utama dari TAN adalah mengubah perilaku negara sesuai dengan klaim seputar isu yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Jaringan transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, sehingga mereka tidak menggunakan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, '*informations politics*' yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Kedua*, '*symbolic Politics*' yaitu kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

*Ketiga*, '*leverage politics*' yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Keempat*, '*accountability politics*' yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan aktivisme jaringan untuk mencapai tujuan perjuangannya. Pada bagian ini, penulis berusaha mengidentifikasi berdasarkan tipologi taktik yang digunakan oleh aktivisme Gerakan *#MeToo* menyempitkan fokus terhadap Gerakan *#MeToo* AS dalam upaya memengaruhi perilaku negara untuk mereformasi undang-undangnya dalam

menangani pelecehan seksual di tempat kerja yang lebih solutif. Berikut merupakan analisa taktik gerakan yang dikelompokkan berdasarkan tipologi taktik TAN.

### **3.1.1. *Information Politics***

Mobilisasi Gerakan *#MeToo* berlangsung secara bersamaan di seluruh dunia melalui momentum tagar sehingga menyebabkan aktivisme transnasional terjadi sangat cepat dan kompleks. Momentum Gerakan *#MeToo* global merupakan aksi kolektif dari eksistensi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara termasuk di AS sendiri. Mereka menjadi bagian dari gerakan melalui informasi dasar yang mereka dapatkan melalui *platform* media sosial. Isu normatif telah membangun kesadaran dan pemahaman bersama terhadap isu tersebut. Mereka berjuang melawan pelecehan seksual di tempat kerja untuk memengaruhi perubahan legislatif di negaranya masing-masing. Peran sentral informasi dalam semua masalah ini membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Jaringan adalah struktur komunikatif (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Sehingga informasi memiliki peran sentral dalam memperkuat jaringan dan sangat penting untuk efektifitas jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). '*Informations Politics*' adalah kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Pertukaran informasi yang kompleks di antara jaringan merupakan taktik utama dalam memperkuat jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Informasi sangat penting bagi perantara terhubungnya Gerakan *#MeToo* di berbagai negara. Mobilisasi Gerakan *#MeToo* di seluruh dunia tercipta melalui peranan media sosial, yang juga di dorong oleh kontribusi besar dari media

internasional dalam mempublikasikan hal tersebut. Media merupakan mitra penting dalam politik informasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Namun, dorongan liputan media dan perluasan melalui media sosial saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana orang-orang termotivasi untuk melakukan tindakan kolektif terhadap isu tersebut.

Dalam hal ini, advokasi awal *#MeToo* berawal dari seorang individu yang sengaja membagikan kisah pengalaman pelecehan seksualnya sendiri di media sosial dan mengajak orang lain yang mengalami untuk berani mengungkapkan. Aliran informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta, tapi juga kesaksian cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang mengalami masalah yang akan diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Dengan menafsirkan fakta dan kesaksian, kelompok aktivis membingkai isu dalam konteks benar atau salah untuk mempersuasi dan menstimulasi masyarakat untuk bertindak dan memberikan dukungan atas isu yang diperjuangkan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Ini merupakan penggunaan informasi testimonial untuk mencapai informasi teknis atau statistik (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Tanpa adanya kasus-kasus individual, para aktivis tidak dapat memotivasi orang untuk turut menuntut perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Advokasi secara persuasif mempublikasikan berbagai cerita-cerita kisah nyata yang berkaitan dengan pengalaman pelecehan seksual oleh para penyintas. Melalui *platform* Twitter, para penyintas pelecehan seksual turut memberanikan diri untuk membagi kisah-kisah mereka dimana sebelumnya mereka tidak memiliki akses (Lakritz, 2018). Dengan meningkatnya perhatian publik akan mendorong media untuk menyoroti hal tersebut. Para aktor atau kelompok aktivis akan

berupaya menjangkau audiens yang lebih luas dengan menarik perhatian pers, termasuk jurnalis yang simpatik dan mungkin menjadi bagian dari jaringan akan membantu mengemas informasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

TAN merupakan aktor non-negara sehingga mereka tidak memiliki akses politik resmi seperti negara, sehingga mereka tidak memiliki *power* secara tradisional seperti militer maupun ekonomi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Akibatnya mereka harus mencari cara agar isu mereka mendapat perhatian dan masuk menjadi agenda pembahasan aktor-aktor yang memiliki akses institusional tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Mereka berupaya dengan melakukan advokasi, di mana para aktor dalam jaringan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat serta membagikannya secara efektif (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

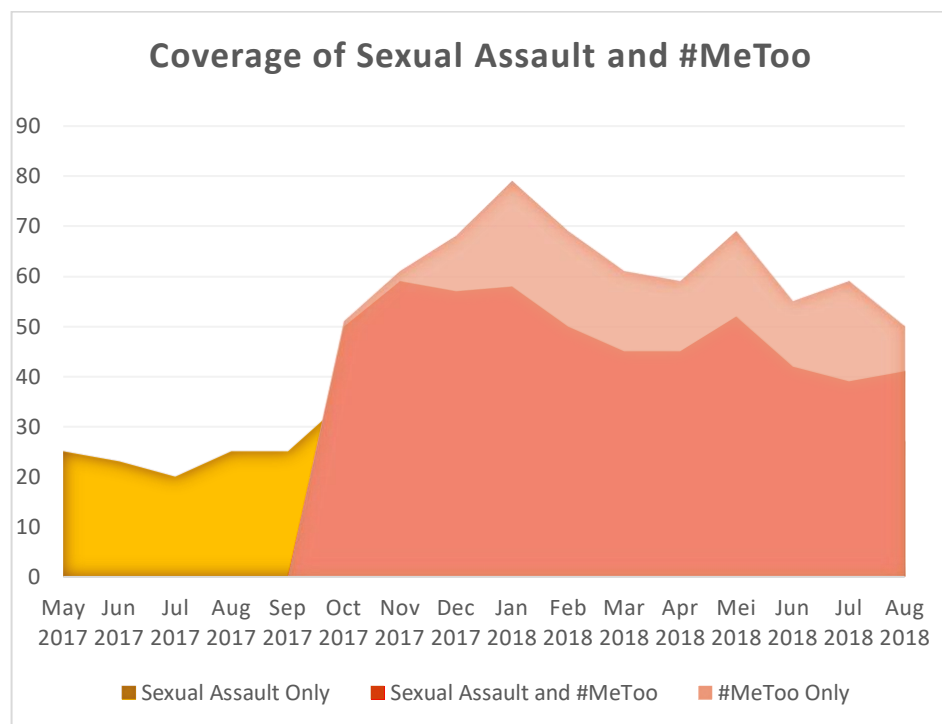
Media nasional pada tiap-tiap negara akhirnya mulai menyoroti permasalahan ini untuk menunjukkan dampak Gerakan *#MeToo* pada masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya dukungan masyarakat dalam meyarakan *#MeToo* baik melalui media sosial, pelaporan hukum ataupun audiensi yang diadakan oleh para aktivis. Di Amerika Serikat, peranan media nasional sangat besar terutama media-media terkemuka AS yang potensial untuk di akses orang-orang di seluruh dunia. Terutama *The New York Times* yang mempublikasikan *#MeToo* pertama kali melalui berita Alyssa Milano dan Harvey Weinstein sebagai sorotan.

Kekuatan *#MeToo* telah menciptakan timbal balik liputan media dan tindakan masyarakat dalam berbicara lebih banyak tentang pelecehan seksual di tingkat domestik. Keberadaan tagar telah mendorong banyak orang untuk berbicara

mengenai pelecehan seksual baik secara *online* maupun dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong liputan media (Ennis & Wolfe, 2018). Sebaliknya, liputan media memberikan informasi mengenai masalah tersebut dan mendorong lebih banyak orang lagi untuk turut berbicara mengenai pelecehan seksual (Ennis & Wolfe, 2018).

Pasca #MeToo, penelitian oleh *Women's Media Center* meneliti proporsi liputan mengenai pelecehan seksual di media nasional AS meningkat dan tren ini sebagian besar dikaitkan dengan Gerakan #MeToo (Ennis & Wolfe, 2018). Temuan ini ditunjukkan dalam grafik 3.1.

**Grafik 1. Liputan Media tentang Pelecehan Seksual dan Gerakan #MeToo di Media Nasional AS**



Sumber: Ennis & Wolfe, #MeToo: *The Women's Media Center Report* (2019), hal. 4

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan liputan media tentang pelecehan seksual dan Gerakan *#MeToo* pada lima bulan sebelum momentum *#MeToo* dan sepuluh bulan setelahnya. Hasil menunjukkan bahwa momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan liputan media nasional tentang pelecehan seksual terutama yang mengaitkannya dengan Gerakan *#MeToo*. Jumlah keseluruhan liputan media tentang pelecehan seksual setelah Oktober 2017 atau pasca *#MeToo* lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan sebelum Oktober 2017 (Ennis & Wolfe, 2018).

Pada bulan Oktober 2017, merupakan bulan di mana momentum *#MeToo* terjadi, peningkatan liputan media sebagian besar didorong oleh jurnalis perempuan atau editor mereka yang mengakui pentingnya masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Dengan meningkatnya rasa percaya diri para penyintas di berbagai kategori dunia kerja AS untuk mempublikasikan masalah ini, gelombang pelaporan tersebut juga memengaruhi lingkungan kerja media. Media mendapati pelaporan cerita pelecehan seksual sebanyak 1.076 dari Mei 2017 hingga Agustus 2018 (Ennis & Wolfe, 2018).

Ketika pelecehan seksual di tempat kerja menjadi diskusi nasional akibat Gerakan *#MeToo*, para jurnalis perempuan yang merupakan penyintas juga turut memberanikan diri maju ke depan (Ennis & Wolfe, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa reporter wanita berusaha lebih keras untuk membahas masalah ini dan editor menugaskan lebih banyak untuk wanita terhadap artikel atau berita yang membawa masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Gerakan *#MeToo* sendiri merupakan gerakan yang digerakkan oleh perempuan, sehingga jurnalis perempuan paling keras mengadvokasi peliputan lebih untuk masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Jurnalis yang simpatik dapat menjadi bagian dari jaringan, tetapi lebih sering aktivis

jaringan memupuk reputasi untuk kredibilitas dengan pers, mereka mengemas isu untuk menarik perhatian pers (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Selain melalui media, aktivis Gerakan *#MeToo* terutama *networker* inti juga terus mengadvokasikan gerakan melalui informasi yang dapat di akses oleh jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tarana Burke sebagai pemimpin gerakan asli tentu menjadi pemegang kampanye inti melalui *website* resmi '*MeToo Movement*'. Setelah momentum *#MeToo* terjadi, *website* semakin aktif dalam membagikan informasi seputar kegiatan gerakan berupa diskusi dan pertemuan yang membahas mengenai masalah *#MeToo*. Di sisi lain, *website* juga menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat di akses secara umum seputar perkembangan Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat. Penyelenggara kampanye inti harus memastikan bahwa individu dan organisasi mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Dalam *website* resminya, *MeToo Movement* memberikan informasi sumber daya nasional dan organisasi lokal yang turut menjadi advokat dalam menangani masalah seputar pelecehan seksual di tempat kerja domestik AS (*MeToo Movement*, 2019). Gerakan *#MeToo* tengah menjadi perhatian internasional dan nasional AS sehingga keaktifan gerakan dalam memperbarui perkembangan gerakan dan isu sangat diperlukan untuk meningkatkan intensitas perhatian publik. Pencarian utama orang-orang untuk mengetahui apa itu Gerakan *#MeToo* bagi mereka yang belum mengenalnya tentu akan menuju kepada *website* resmi tersebut.

Taktik berupa *information politics* dapat diidentifikasi melalui aktivisme yang dilakukan oleh para aktor Gerakan *#MeToo* AS dalam membingkai isu agar semakin terdengar oleh para pembuat kebijakan AS mengenai urgensi dari isu yang



diadvokasikan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan masalah pelecehan seksual, para aktivis yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah ini terus memajukan isu untuk tetap memperkuat perhatian atas isu tersebut. Mereka terus membagikan informasi yang berkaitan dengan *#MeToo* secara aktif terutama melalui advokasi di media sosial. Kesadaran media nasional ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat namun di negara-negara lainnya di mana mobilisasi berdampak bagi negaranya. Kontribusi masing-masing media nasional tersebut merupakan tautan yang memungkinkan gerakan saling memantau informasi dari banyak negara.

Dalam arena internasional, salah satu dukungan besar dengan meluasnya *hashtag #MeToo* dan meningkatnya isu ini dalam media arus utama adalah bantuan dari proyek '*Me Too Rising*' oleh Google. Melalui situs *web* tersebut, Google memetakan informasi dengan visualisasi tren pencarian di sekitar *#MeToo* sejak pertama kali berita mengenai *#MeToo* diterbitkan pada awal Oktober oleh *The New York Times* dan *The New Yorker* (Buxton, 2018). Hal ini sehubungan dengan pengakuan dari kampanye terkait *Sexual Assault Awareness Month* di dunia (Buxton, 2018).

Tren pencarian *#MeToo* secara global telah meningkat dan telah dipetakan oleh *MeToo Rising* dimana akses informasi terkait perkembangan Gerakan *#MeToo* diseluruh dunia menjadi mudah. Perkembangan informasi yang semakin besar tentunya akan menciptakan resonansi diantara para aktor pemain politik internasional dan memengaruhi para aktor negara untuk merespons masalah ini. Aktor-aktor non-pemerintah ini akan berupaya menjadi aktor berpengaruh dalam politik internasional dengan menjadi sumber informasi alternatif (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Gerakan *#MeToo* secara global terus memperbesar perhatian untuk memengaruhi kesadaran organisasi-organisasi internasional kuat maupun negara untuk memperkuat klaim mereka. Melalui kontribusi media dalam mempublikasikan isu agar secara luas mudah di akses oleh masyarakat di seluruh dunia. Mereka menyediakan akses dan sumber informasi yang diperlukan jaringan melalui kontak dengan kelompok yang bergabung dengan jaringan yang terdapat di berbagai wilayah geografis berbeda (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Hal ini membantu memperluas legitimasi mereka, dan memobilisasi informasi di sekitar target kebijakan tertentu (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

### **3.1.2. *Symbolic Politics***

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalis untuk pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). '*Symbolic Politics*' ini didefinisikan dengan kemampuan untuk menggunakan simbol untuk menjelaskan peristiwa penting terkait klaim atau isu yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Aktivis Gerakan *#MeToo* dapat diidentifikasi telah menggunakan politik simbolik melalui beberapa poin diantaranya; melalui tagar *#MeToo* sebagai klaim atas masalah pelecehan seksual, dan melalui acara *Golden Globe Awards* di mana dengan menunjukkan pakaian serba hitam dan pin *Time's Up* yang dipahami sebagai solidaritas terhadap masalah pelecehan seksual di dalam negeri untuk memberikan dana hukum.

Tagar telah menjadi taktik simbolik bagi gerakan *#MeToo* di mana melalui tagar *#MeToo* telah memberikan efek terhadap meningkatnya klaim atas kasus

pelecehan seksual khususnya di AS sendiri. Tagar telah mendorong orang-orang khususnya para penyintas merasa mendapatkan dukungan terhadap pelecehan seksual yang dialaminya bahwa mereka tidak sendirian. Mereka menjadi berani membagikan kisah yang mereka alami terkait pelecehan seksual dengan menyematkan tagar. Terdorongnya para penyintas yang membagikan cerita melalui tagar telah menciptakan solidaritas antar sesama yang membawa mereka termotivasi untuk melakukan tindakan kolektif menunjukkan tingginya prevalensi kasus ini.

Tagar telah memberikan kekuatan bagi para penyintas pelecehan seksual yang sebelumnya enggan untuk mengakui karena adanya faktor penghambat seperti budaya yang cenderung menyalahkan korban dan risiko karier. Penggunaan tagar *#MeToo* telah berhasil menjadi simbol bagi isu pelecehan seksual di Amerika Serikat. Kasus pelecehan seksual menjadi tren liputan di berbagai media nasional AS, di mana artikel membahas masalah ini meningkat pasca momentum tagar. Dalam laporan *Women's Media Center*, menemukan pasca momentum *#MeToo* hingga Februari 2018, lebih dari 55 persen cerita tentang kasus pelecehan seksual di AS menyebutkan Gerakan *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Tagar *#MeToo* pada gilirannya telah menjadi simbolik untuk menyuarakan isu mengenai pelecehan seksual di tempat kerja di seluruh dunia.

Perluasan dengan simbol berupa tagar yang memiliki istilah sama dengan *'Me Too'* digunakan oleh Gerakan *#MeToo* maupun mobilisasi serupa di berbagai negara. Seperti, *#MeTooInChina* dan *#RiceBunny* di Tiongkok, *#QuellaVoltaChe* di Italia, *#YoTambien* di Spanyol, *#AnaKaman* di Arab (Adam & Booth, 2018). Di Prancis menggunakan tagar *#BalanceTonPorc*, Senegal menggunakan

#*Nopiwouma*, begitu juga Korea Selatan, Swedia, Mesir dan lainnya menggunakan bahasa kreatif mereka (Stone & Vogelstein, 2019). Tagar telah menjadi dukungan bagi para penyintas di seluruh dunia untuk berani mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Selain menggunakan tagar sebagai politik simbolik, Aktivistis Gerakan #*MeToo* AS juga berupaya memberikan dukungan bagi penyintas melalui suatu peristiwa simbolik yang menarik perhatian publik. Melalui acara *Golden Globe Awards*, para aktor Hollywood baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan solidaritas dengan memakai pakaian serba hitam (Safronova, 2018). Dengan menyematkan pin *Time's Up* hitam-putih di baju mereka sebagai aksesoris politik yang berarti melawan pelecehan seksual di tempat kerja di seluruh negeri (Safronova, 2018). *Time's Up* dalam acara ini telah memperkenalkan adanya dukungan dana hukum melalui *Times's Up Legal Defense Fund* (Safronova, 2018). Dengan politik simbolik melalui acara ini telah memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai dukungan dana hukum bagi masyarakat AS di seluruh bidang industri untuk meningkatkan laporan hukum terhadap kasus (Langone, 2018).

Penelitian *Women's Media Center* menunjukkan bahwa perhatian media cenderung meningkat ketika meliput tokoh-tokoh terkenal dan sering mengabaikan banyak kasus yang melibatkan orang biasa (Ennis & Wolfe, 2018). Sehingga untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat AS terhadap pemahaman ini, para aktor Hollywood khususnya perempuan membuat suatu peristiwa yang menjadi sorotan publik. Dunia hiburan tentunya memiliki potensi untuk menarik perhatian media nasional. Melalui peristiwa *Time's Up* tersebut telah mendorong orang-orang

terutama penyintas yang berasal dari industri rendah mendapatkan dukungan untuk melaporkan secara hukum.

*Time's Up* telah menjadi politik simbolik di mana efek dari pertunjukan solidaritas dalam *Golden Globe Awards* tersebut mendorong penyintas merasa memiliki kesempatan melaporkan secara hukum. Taktik politik simbolik merupakan salah satu perjuangan jaringan melalui berbagai simbol-simbol yang dapat menarik perhatian serta memberi penjelasan yang meyakinkan untuk keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Simbol-simbol ini sangat penting untuk mendukung kemajuan dan keberhasilan jaringan dimana simbol mempermudah banyak orang untuk mengenali dan mengingat suatu peristiwa tertentu.

Kemampuan Gerakan *#MeToo* AS melalui kedua politik simbolik tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi meluasnya kesadaran masyarakat untuk menunjukkan tingginya prevalensi masalah ini dihadapi. Penafsiran simbolis adalah bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Seringkali aktivis akan mbingkai masalah dengan membawa peristiwa simbolik tertentu, dimana kasusnya banyak terjadi sehingga membuat orang untuk turut mengambil tindakan dan mendorong pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

### **3.1.3. Leverage Politics**

Politik pengaruh adalah kemampuan jaringan dalam mencari pengaruh melalui dukungan atas aktor yang lebih kuat sebagai langkah strategis kampanye jaringan dalam mempengaruhi aktor negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dalam

suatu advokasi, aktivis dalam jaringan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang politik yakni dengan membujuk dan menekan aktor-aktor yang lebih kuat (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Jaringan akan menggunakan daya ungkit atas lembaga-lembaga yang lebih kuat untuk mendapatkan pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk memengaruhi praktik negara secara langsung (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Keck & Sikkink membagi dua jenis *leverage*, yakni; *moral leverage*, dan *material leverage* (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Pengaruh moral cenderung mengarah pada “*mobilization of shame*”, terhadap perilaku aktor-aktor sasaran sebagai pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Sedangkan pengaruh material dapat berupa uang, barang, atau berbagai bentuk keuntungan lainnya yang biasanya mengarah pada tautan isu ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan militer ataupun hubungan diplomatik (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Taktik *leverage politics* dalam aktivisme Gerakan #MeToo yang merupakan *moral leverage*, dapat diidentifikasi melalui dampak #MeToo yang berhasil menjatuhkan para pelaku pelecehan seksual dari pekerjaannya melalui meningkatnya tuduhan. Dalam beberapa kasus pengunduran diri atau pemecatan orang-orang terkemuka dari pekerjaannya akibat meningkatnya tuduhan dari korban, telah menunjukkan bagaimana “*mobilization of shame*” berlaku dalam kasus ini. Aktor-aktor sasaran yang merupakan pelaku pelecehan seksual telah mengalami pengaruh moral yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan sebagai konsekuensi atas tindakannya.

Dalam survei Bloomberg mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan dan pelanggaran pasca momentum

*#MeToo*, yang sebagian besar pria termasuk orang-orang terkemuka telah dipecat, mengundurkan diri, atau menghadapi konsekuensi profesional lainnya (Griffin, Recht, & Green, 2018). Pengaruh moral ini telah menunjukkan tingginya prevalensi kasus yang disebabkan tingginya angka orang-orang yang kehilangan pekerjaan sebagai konsekuensi atas tindakannya.

*Moral leverage* ini juga telah mempengaruhi PBB sebagai organisasi kuat di dunia, bahwa pada tahun 2017 laporan kasus pelecehan seksual terhadap staf internal PBB meningkat di berbagai badan-badan PBB (Bacchi, 2018). Badan-badan terkemuka PBB, termasuk *World Food Program* (WFP) dan UNHCR telah memecat beberapa staf karena laporan pelecehan seksual (Bacchi, 2018). Hal ini telah membuktikan pengaruh moral bagi PBB sendiri untuk melakukan pemecatan terhadap staf nya. PBB merupakan organisasi yang didedikasikan untuk melayani dan melindungi orang lain, sehingga untuk mempertahankan prestise internasional maka adanya pelanggaran internal semacam itu di anggap memalukan bagi organisasi tersebut.

Dengan banyaknya kasus-kasus individual tersebut yang menyangkut pengaruh moral tersebut telah mendorong beberapa pihak untuk menciptakan tindakan kolektif yang menangani masalah ini yang mengarah pada *material leverage*. Taktik politik pengaruh yang merupakan *material leverage*, dapat diidentifikasi dalam kasus ini di mana dampak dari tingginya prevalensi kasus ini menyebabkan aktor-aktor yang memiliki *power* terhadap institusi politik menciptakan sistem hukum yang melindungi para korban. Beberapa institusi telah menciptakan hukum baru dalam rangka menanggapi masalah pelecehan seksual di tempat kerja. *Material leverage* dalam bentuk produk hukum yang dapat

diidentifikasi dalam kasus ini diantaranya; Resolusi yang dikeluarkan ILO sebagai dukungan secara internasional, sedangkan dukungan dalam domestik berupa dikeluarkannya RUU *Be Heard in the Workplace Act*, direformasinya *Congressional Accountability Act of 1995*, dan didirikan dana hukum oleh *Time's Up Legal Defense Fund*.

Dengan diciptakannya sistem hukum baru oleh beberapa aktor tersebut telah menunjukkan bahwa Gerakan *#MeToo* mampu mempengaruhi aktor-aktor kuat dalam hubungan internasional baik negara maupun organisasi internasional secara material. Hukum yang dikeluarkan akan menjadi legitimasi bagi para korban untuk melaporkan dan memastikan mereka terlindungi di bawah peraturan hukum tersebut. Aturan tersebut merupakan pengaruh material bagi para pelaku yang dilaporkan karena secara otomatis mereka pasti akan mendapatkan sanksi baik berupa denda maupun konsekuensi lainnya di bawah produk hukum tersebut.

Dalam hal ini, *material leverage* Gerakan *#MeToo* telah berhasil menarik perhatian dan mendorong tindakan oleh tempat-tempat kelembagaan yang menguntungkan seperti ILO untuk memperkuat legitimasi klaim mereka. Hal ini berhasil dicapai ketika Gerakan *#MeToo* mampu memengaruhi inisiatif organisasi besar yaitu ILO untuk menciptakan standar hukum internasional. Aktivis harus kritis terhadap efektifitas politik terhadap advokasi mereka tersebut dengan melibatkan aktor kuat dan berpengaruh di dunia (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Sementara itu, *material leverage* dalam kasus ini juga datang dari organisasi domestik AS sendiri yang berinisiatif memberikan dana hukum bagi para penyintas di berbagai industri untuk melakukan pelaporan. Melalui *Time's Up Legal Defense Fund*, telah memberikan akses bagi masyarakat yang ingin melakukan pelaporan



hukum namun terhambat secara finansial. *Time's Up* merupakan bagian dari mobilisasi dari Gerakan *#MeToo* yang berasal dari kalangan yang bekerja di industri hiburan Hollywood. Dana hukum tersebut telah menjadi *material leverage* yang mendukung para penyintas untuk lebih dekat dengan perlindungan hukum.

Pengaruh material ini juga ditunjukkan oleh sistem hukum Amerika yang mulai memperkenalkan RUU reformasi terhadap hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Pada tanggal 9 April 2019, Kongres AS memperkenalkan H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* ke tahap pertama dari proses legislatif (GovTrack.us, 2019). RUU ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan seksual di dunia pekerjaan (GovTrack.us, 2019). Keseluruhan RUU memiliki lima Judul dengan mengamandemen pada UU ketenagakerjaan sebelumnya pada; *Title VII of the Civil Rights Act of 1964* yang mengatur ketenagakerjaan secara umum; *Government Employee Rights Act of 1991*; *The Congressional Accountability Act of 1995*; dan *The Civil Service Reform Act Of 1978* (GovTrack.us, 2019). Namun, status RUU ini belum melalui proses pada pengesahan UU melalui persetujuan semua majelis dan Presiden AS (GovTrack.us, 2019).

Lembaga Kongres AS sendiri juga telah memperkenalkan RUU untuk mereformasi *Congressional Accountability Act of 1995* pada tanggal 13 Desember 2018 secara terpisah dari yang diajukan di dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* (GovTrack.us, 2018). RUU ini telah disahkan pada tanggal 21 Desember 2018 dalam S.3749 (115<sup>TH</sup>): *Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act* (GovTrack.us, 2018). UU ini berisi perlindungan terhadap pelecehan seksual khusus bagi karyawan cabang legislatif (GovTrack.us, 2018). Reformasi ini

telah di dorong oleh meningkatnya pelaporan di dalam internal Kongres AS sendiri terhadap kasus pelecehan seksual. Selama tahun 2017-2018, Kongres AS mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018).

Dengan demikian, *material leverage* yang telah diupayakan melalui sistem hukum AS tersebut telah menunjukkan adanya langkah yang di ambil pemerintah AS untuk merespons masalah pelecehan seksual di tempat kerja AS. Namun, secara *material leverage* dalam kasus ini belum mencapai hasil maksimal di mana keseluruhan sistem hukum yang dikeluarkan belum diberlakukan secara resmi karena belum berhasil disahkan. Meskipun Kongres telah berhasil mengesahkan UU yang mereformasi hukum pelecehan seksualnya secara internal, hal ini belum dapat mewakili masyarakat secara umum karena UU tersebut hanya berlaku bagi politisi Kongres.

#### **3.1.4. *Accountability Politics***

Politik Akuntabilitas menjadi taktik yang dapat digunakan jaringan ketika aktor target yakni pemerintah telah memberi komitmen untuk merubah perilaku negara atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dengan hal itu, jaringan memiliki peluang politik akuntabilitas yakni dapat mendapatkan posisi untuk mengamati antara wacana dan praktik dari komitmen tersebut sebagai komando informasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Taktik ini bertujuan agar implementasi dari perubahan hukum berjalan sesuai dengan komitmen, dimana seringkali pemerintah membuat komitmen perubahan hanya untuk mengalihkan jaringan dan perhatian publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Jaringan

akan berupaya mengawasi komitmen tersebut untuk mencegah penyimpangan aktor target (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dalam hal ini, Gerakan *#MeToo* AS belum dapat memiliki peluang politik akuntabilitas, di mana hukum pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri belum resmi ditandatangani oleh pemerintah dan masih dalam bentuk RUU.

Dari serangkaian taktik yang tersebut telah menunjukkan bagaimana upaya Gerakan *#MeToo* dalam mencapai tujuannya. Bagian ini telah menganalisa aktivisme gerakan melalui tipologi taktik dalam teori TAN yang dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

**Tabel 1. Taktik Gerakan *#MeToo* AS berdasarkan tipologi taktik dalam teori *Transnational Advocacy Network***

Taktik Jaringan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
<i>Information Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran sentral media baik nasional dan internasional serta keaktifan gerakan dalam membagikan informasi telah mendorong perluasan mobilisasi gerakan.</li> <li>• Aktivis inti Gerakan <i>#MeToo</i> aktif membagikan informasi melalui <i>website</i> sebagai sumber informasi perkembangan gerakan.</li> </ul>
<i>Symbolic Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagar <i>#MeToo</i> sebagai klaim atas masalah pelecehan seksual</li> <li>• Melalui acara <i>Golden Globe Awards</i> di mana dengan menunjukkan pakaian serba hitam</li> </ul>

			<p>dan pin <i>Time's Up</i> yang dipahami sebagai solidaritas terhadap masalah pelecehan seksual di dalam negeri melalui penyediaan dana hukum.</p>
<i>Leverage Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moral leverage</i> dapat diidentifikasi melalui dampak #<i>MeToo</i> yang berhasil menjatuhkan para pelaku pelecehan seksual dari pekerjaannya melalui meningkatnya tuduhan.</li> <li>• <i>Material Leverage</i> dalam bentuk produk hukum yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini diantaranya; Resolusi yang dikeluarkan ILO sebagai dukungan secara internasional, sedangkan dukungan dalam domestik berupa dikeluarkannya RUU <i>Be Heard in the Workplace Act</i>, direformasinya <i>Congressional Accountability Act of 1995</i>, dan didirikan dana hukum oleh <i>Time's Up Legal Defense Fund</i>.</li> </ul>
<i>Accountability Politics</i>		✓	<p>Gerakan #<i>MeToo</i> AS belum memiliki peluang politik akuntabilitas di mana reformasi terhadap hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja belum disahkan menjadi Undang-undang.</p>

Sumber: Diolah melalui Tipologi Taktik dalam Keck & Sikkink (1999)

### **3.2. Hasil Pencapaian Gerakan #MeToo AS dalam Memengaruhi Kebijakan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja AS**

Dalam menilai pencapaian jaringan advokasi, Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda. *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional. *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan. *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam ‘aktor target’ yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta. *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara.

Setelah melalui berbagai taktik-taktik diatas baik secara domestik maupun dukungan internasional, pencapaian Gerakan #MeToo AS akan di analisa melalui jenis tahapan pengaruh menurut Keck & Sikkink. Pada tahap pertama, jaringan menghasilkan perhatian pada masalah baru dan membantu mengatur agenda ketika mereka memprovokasi perhatian media, debat, audiensi, dan pertemuan tentang isu-isu yang sebelumnya bukan masalah debat publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Latar belakang Gerakan #MeToo terbentuk melalui aktor domestik yang memprovokasi perhatian media melalui masalah pelecehan seksual di tempat kerja yang mbingkainya melalui membagi cerita pengalamannya. Kesuksesan momentum #MeToo menjadi perhatian internasional telah menunjukkan bahwa tahapan pertama ini telah berhasil dicapai oleh Gerakan #MeToo.

Setelah jaringan dapat memengaruhi perhatian publik, maka tahapan kedua adalah upaya dalam memengaruhi posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam mempengaruhi posisi

diskursif, jaringan akan membujuk negara dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap apa yang diadvokasikan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Peran Gerakan *#MeToo* dalam memengaruhi kesadaran organisasi besar berupa ILO yang menghasilkan deklarasi internasional telah menjelaskan pencapaian Gerakan *#MeToo* pada tahap kedua ini.

Penetapan standar ILO melalui Konvensi No.190 Tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja telah menunjukkan pengaruh posisi diskursif oleh Gerakan *#MeToo* berhasil dicapai. Sementara, dalam ranah domestik AS, pengaruh dalam mengubah posisi kebijakan domestik dapat diidentifikasi melalui dikeluarkannya RUU yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* (GovTrack.us, 2019).

Dalam RUU tersebut telah memasukkan beberapa amandemen diantaranya yang paling penting adalah *Title VII Civil Rights Act of 1964* yang merupakan perlindungan luas di seluruh tempat kerja AS (GovTrack.us, 2019). Didalamnya juga termasuk tagihan amandemen *Employee Rights Act of 1991*; *The Congressional Accountability Act of 1995*; dan *The Civil Service Reform Act Of 1978* (GovTrack.us, 2019). Langkah pemerintah AS dalam mereformasi undang-undangnya tersebut menjadi pencapaian Gerakan *#MeToo* AS dalam memengaruhi posisi kebijakan domestik negaranya.

Selanjutnya pada tahap ketiga adalah pengaruh pada prosedur kelembagaan. Dalam mencapai tahap pengaruh ini, jaringan berupaya menekan negara-negara bagian untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Pada tahap ini, aktivisme

Gerakan *#MeToo* diidentifikasi belum dapat mencapai pengaruh ini. Meskipun Gerakan *#MeToo* telah berhasil mendorong ILO untuk bertindak dalam mengeluarkan komitmen yang mengikat melalui konvensi, pengaruh prosedur kelembagaan belum berlaku. Negara-negara yang menjadi anggota ILO belum ada yang meratifikasi Konvensi No.190 Tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja tersebut. Sedangkan konvensi baru akan mulai berlaku dalam dua belas bulan setelah minimal dua Negara anggota meratifikasinya (ILO, 2019). Sehingga pemberlakuan terhadap penetapan ILO tersebut belum dilaksanakan.

Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi konvensi tersebut meskipun dalam pemungutan suara telah menyetujui adopsi konvensi tersebut. Sementara, dalam ranah domestik AS sendiri, RUU yang diperkenalkan untuk mereformasi pelecehan seksual di tempat kerja dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* belum disahkan menjadi undang-undang (GovTrack.us, 2019). Sehingga tahap pencapaian Gerakan *#MeToo* belum mencapai pada tahapan pengaruh ini.

Dengan demikian, pengaruh pada tahapan keempat dan kelima belum dapat dicapai apabila tahapan sebelumnya belum terselesaikan. Pada tahapan keempat yang berupa pengaruh pada kebijakan aktor target baik negara maupun organisasi internasional dapat dicapai apabila gerakan telah mencapai pengaruh prosedur kelembagaan. Sedangkan pengaruh kelima yang berupa pengaruh pada perilaku negara mengarah pada penerapan dari kebijakan apabila telah disahkan secara resmi sebagai bentuk implementasi. Pencapaian Gerakan *#MeToo* AS dalam memengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di Amerika Serikat

yang telah diukur melalui tahapan pengaruh oleh Keck & Sikkink ini menghasilkan jawaban pada tahapan kedua.